

DAMPAK KETERBATASAN AKSES TERHADAP KUALITAS PENDIDIKAN DI DESA ALIM : ANALISIS KUALITATIF DAN SOLUSI

Nurlaila Nuzila¹, Syaquila Alia Zamara², Putri Adabiyah³, Regia Reha Datul⁴, Nadia Sari Ningsih⁵, Aulia Tri Halimah⁶

nurlaila.nuzila2079@student.unri.ac.id¹, syaquila.alia2841@student.unri.ac.id²,
putri.adabiyah1473@student.unri.ac.id³, regia.reha4711@student.unri.ac.id⁴,
nadia.sari5136@student.unri.ac.id⁵, aulia.tri1469@student.unri.ac.id⁶

Universitas Riau

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak keterbatasan akses terhadap kualitas pendidikan di Desa Alim, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur pendidikan, kondisi geografis, dan rendahnya dukungan pemerintah desa berdampak negatif terhadap kualitas pendidikan, terutama pada aspek kehadiran siswa, motivasi belajar, dan prestasi akademik. Temuan ini mempertegas pentingnya intervensi strategis dalam peningkatan akses pendidikan di daerah tertinggal. Solusi yang ditawarkan meliputi perbaikan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, kolaborasi dengan pihak ketiga, dan penguatan kebijakan pemerintah. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam perumusan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif.

Kata Kunci: Akses Pendidikan, Kualitas Pendidikan, Daerah Tertinggal, Desa Alim, Pendidikan Masyarakat.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara sekaligus elemen strategis dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Upaya pemerataan akses pendidikan telah menjadi prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Meski demikian, tantangan dalam menjamin pemerataan tersebut masih sangat besar, terutama di wilayah tertinggal, terluar, dan terpencil (3T), di mana kesenjangan akses dan kualitas pendidikan masih menjadi persoalan kronis (Kemendikbudristek, 2023; Setneg RI, 2024).

Salah satu wilayah yang merepresentasikan kondisi tersebut adalah Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Desa ini secara administratif telah memiliki lembaga pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa akses fisik menuju lembaga pendidikan tersebut masih mengalami banyak hambatan. Kondisi geografis berupa perbukitan, topografi yang tidak rata, serta jalan tanah yang rusak dan licin saat hujan menjadi penghalang utama bagi siswa dan guru dalam menjangkau sekolah. Ketidakhadiran transportasi umum semakin memperburuk situasi ini.

Lebih lanjut, keterbatasan infrastruktur pendidikan juga menjadi persoalan yang signifikan. Beberapa sekolah masih menggunakan bangunan semi permanen dan berbagi ruang kelas dalam sistem shift karena keterbatasan ruang. Fasilitas penting seperti perpustakaan, laboratorium, dan sanitasi yang layak juga belum tersedia secara memadai. Ditambah lagi, tenaga pendidik yang tersedia terbatas baik dari segi jumlah maupun kualifikasi akademik, di mana banyak guru berstatus honorer dengan insentif yang rendah.

Namun demikian, semangat masyarakat terhadap pendidikan tidak serta-merta padam. Terdapat inisiatif lokal yang menunjukkan kepedulian kolektif terhadap pendidikan, seperti pembangunan ruang kelas secara gotong royong, penggalangan dana

swadaya, hingga kolaborasi dalam kegiatan keagamaan dan sosial. Meskipun dukungan dari pemerintah desa dinilai masih minim, partisipasi masyarakat menjadi kekuatan sosial yang patut diperhitungkan dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di tengah keterbatasan.

Penelitian mengenai dampak keterbatasan akses terhadap pendidikan di daerah terpencil menjadi semakin relevan mengingat komitmen pemerintah Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya terkait pendidikan berkualitas untuk semua. Studi ini bertujuan menganalisis dampak keterbatasan akses terhadap kualitas pendidikan di Desa Alim dengan fokus pada tiga aspek utama: kondisi infrastruktur transportasi, ketersediaan fasilitas pendidikan, dan peran partisipasi masyarakat dalam mendukung pendidikan.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi secara mendalam berbagai bentuk keterbatasan akses pendidikan di Desa Alim, serta menganalisis dampaknya terhadap kualitas pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menggali strategi adaptasi yang telah dilakukan sekolah dan masyarakat dalam mengatasi berbagai tantangan tersebut. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan solusi kebijakan yang kontekstual, inklusif, dan berkelanjutan bagi pengembangan pendidikan di wilayah 3T.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif guna menggambarkan kondisi nyata pendidikan di Desa Alim secara mendalam dan kontekstual. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan untuk memahami fenomena sosial dalam konteks aslinya, sejalan dengan pandangan Moleong (2018) bahwa pendekatan kualitatif bertujuan mengungkap makna, struktur, dan pola hubungan sosial yang hidup dalam masyarakat.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap kondisi fisik infrastruktur pendidikan, seperti jalan menuju sekolah, bangunan sekolah, dan lingkungan sosial di sekitar satuan pendidikan. Selain itu, dilakukan wawancara semi-terstruktur dengan berbagai informan kunci, antara lain guru, siswa, tokoh masyarakat, dan perangkat desa, untuk memperoleh informasi yang kaya dan mendalam mengenai tantangan, kebutuhan, serta inisiatif lokal dalam penyelenggaraan pendidikan.

Sebagai pelengkap, digunakan pula dokumentasi lapangan, yang mencakup catatan visual dan tertulis mengenai kondisi akses jalan, sarana prasarana sekolah, serta kegiatan sosial seperti gotong royong warga. Teknik triangulasi sumber dan metode diterapkan untuk meningkatkan validitas data, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai narasumber dan teknik pengumpulan data yang berbeda.

Data yang diperoleh dianalisis secara tematik, dengan langkah-langkah meliputi transkripsi data, pengkodean, identifikasi tema, dan penafsiran pola-pola keterkaitan antara aspek aksesibilitas, infrastruktur pendidikan, dan dukungan sosial terhadap kualitas layanan pendidikan di desa tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Akses ke Pendidikan

Berdasarkan observasi lapangan di Desa Alim, akses menuju lembaga pendidikan formal masih mengalami hambatan serius. Sebagian besar jalur yang digunakan oleh siswa dan guru berupa jalan tanah yang belum diperkeras. Kondisi ini menyebabkan jalan menjadi licin dan berlumpur saat musim hujan serta berdebu ketika kemarau. Selain itu, keberadaan lubang-lubang di sepanjang jalan meningkatkan risiko kecelakaan, terutama

bagi anak-anak yang berjalan kaki atau menggunakan sepeda motor. Jarak tempuh ke sekolah dasar relatif dekat (kurang dari 500 meter), namun untuk jenjang SMP dan SMA, siswa harus berjalan sejauh 500 meter hingga 1 kilometer, melewati jalan yang tidak layak dan minim penerangan.

2. Infrastruktur Pendidikan

Infrastruktur pendidikan di Desa Alim belum memenuhi standar minimal layanan pendidikan. Beberapa sekolah dasar menggunakan sistem shift karena kekurangan ruang kelas, sementara sekolah menengah atas yang baru berdiri masih mengalami keterbatasan dalam sarana dan prasarana, seperti meja, kursi, alat bantu mengajar, serta fasilitas sanitasi. Laboratorium dan perpustakaan belum tersedia secara memadai, begitu pula akses terhadap internet untuk mendukung pembelajaran digital.

3. Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah

Masyarakat di Desa Alim menunjukkan kepedulian tinggi terhadap pendidikan, dibuktikan dengan inisiatif gotong royong membangun ruang kelas tambahan dan membuka jalan akses. Namun demikian, keterlibatan pemerintah desa masih sangat terbatas. Tidak ditemukan adanya kebijakan konkret atau program dari pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas atau infrastruktur pendidikan, baik dari sisi fisik maupun peningkatan kualitas guru. Informasi dari wawancara menyebutkan bahwa hampir seluruh perbaikan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat, sementara pemerintah hanya hadir secara administratif tanpa realisasi anggaran atau kebijakan pendukung

Pembahasan

1. Akses ke Pendidikan

Keterbatasan akses menuju lembaga pendidikan di Desa Alim merupakan cerminan nyata dari masih timpangnya pembangunan infrastruktur dasar di wilayah tertinggal. Kementerian PUPR (2023) menegaskan bahwa pembangunan jalan ke sekolah adalah bagian dari infrastruktur sosial prioritas, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Jalan yang rusak dan minim penerangan tidak hanya berdampak pada keselamatan fisik siswa, tetapi juga menurunkan motivasi belajar dan meningkatkan risiko putus sekolah.

Penelitian oleh Rahmawati & Supriyanto (2023) menemukan bahwa akses fisik yang sulit secara signifikan menurunkan angka partisipasi sekolah tingkat menengah di desa-desa pelosok. Hal ini diperparah oleh minimnya transportasi umum dan kurangnya kebijakan afirmatif dari pemerintah daerah. Maka, pembangunan akses pendidikan tidak cukup hanya dengan mendirikan sekolah, tetapi harus didukung dengan prasarana penunjang yang layak dan aman.

2. Infrastruktur Pendidikan

Fasilitas pendidikan yang minim, seperti yang terjadi di Desa Alim, menunjukkan rendahnya investasi negara dalam menjamin standar layanan minimal pendidikan. Kemendikbudristek (2024) menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki ruang kelas yang layak, sarana-prasarana penunjang, dan akses digital sebagai bagian dari transformasi pendidikan Indonesia.

Hasil kajian oleh Nugroho & Hartini (2022) mengungkapkan bahwa ketimpangan infrastruktur antara kota dan desa berdampak langsung pada kualitas hasil belajar siswa. Di sekolah yang tidak memiliki laboratorium, perpustakaan, atau akses internet, pembelajaran cenderung bersifat konvensional dan pasif. Hal ini menghambat implementasi Kurikulum Merdeka yang menuntut pembelajaran berbasis proyek dan penguatan literasi digital. Maka, pembangunan pendidikan yang merata tidak hanya soal akses fisik ke sekolah, tetapi juga soal kualitas sarana di dalamnya.

3. Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah

Partisipasi aktif masyarakat Desa Alim dalam pembangunan pendidikan patut diapresiasi. Namun, partisipasi ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan kelembagaan. Dalam laporan TIMES Indonesia (2025), ditegaskan bahwa pencapaian pendidikan yang setara di desa-desa hanya dapat diraih dengan sinergi antara masyarakat sipil dan pemerintah desa melalui program dan anggaran yang terstruktur.

Sayangnya, di Desa Alim belum terlihat adanya kebijakan konkret dari pemerintah desa untuk mendukung pendidikan. Hal ini menunjukkan rendahnya prioritas pendidikan dalam perencanaan pembangunan desa. Hasil penelitian oleh Adminira, Ruslan, & Sadriani (2023) menyatakan bahwa keberhasilan pendidikan anak di era digital sangat ditentukan oleh kolaborasi strategis antara keluarga, sekolah, dan pemerintah. Ketidakhadiran pemerintah dalam penguatan SDM lokal merupakan bentuk ketimpangan struktural yang menghambat kemajuan pendidikan desa.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa keterbatasan akses fisik, infrastruktur pendidikan, dan minimnya dukungan pemerintah desa secara signifikan memengaruhi kualitas pendidikan di Desa Alim, Kabupaten Indragiri Hulu. Jalan yang rusak dan tidak layak menghambat mobilitas siswa dan guru, serta menurunkan motivasi belajar. Sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai—seperti kurangnya ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan akses internet—juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan.

Meskipun demikian, partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung keberlangsungan pendidikan menjadi kekuatan sosial yang penting, menunjukkan adanya kesadaran kolektif akan pentingnya pendidikan. Sayangnya, upaya ini belum diimbangi oleh dukungan kebijakan dan pendanaan dari pemerintah desa, yang seharusnya menjadi pemangku kepentingan utama dalam perencanaan pembangunan lokal.

Oleh karena itu, solusi terhadap permasalahan ini harus bersifat multidimensional. Perlu adanya intervensi dari pemerintah daerah maupun pusat untuk memperbaiki infrastruktur dasar dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Selain itu, kolaborasi yang kuat antara masyarakat, sekolah, dan pemerintah desa sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan di wilayah-wilayah tertinggal seperti Desa Alim.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar dan Menengah di Wilayah Terpencil. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2023). Laporan Kinerja Infrastruktur Jalan Nasional 3T. Jakarta: Kementerian PUPR.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2023). Pendidikan di Wilayah Terpencil: Tantangan Pemerintah dalam Pemerataan Pendidikan di Indonesia. Retrieved from https://setneg.go.id/baca/index/pendidikan_di_wilayah_terpencil_tantangan_pemerintah_dalam_pemerataan_pendidikan_di_indonesia_1
- TIMES Indonesia. (2025). Hardiknas 2025: Bergerak Bersama, Wujudkan Pendidikan Merata. Retrieved from <https://timesindonesia.co.id/kopi-times/537380/hardiknas-2025-bergerak-bersama-wujudkan-pendidikan-merata>
- Adminira, Z., Ruslan, Z. A., & Sadriani, A. (2023). Peran orang tua dalam mendidik generasi alfa di era digital pada SDN Batulaccu Makassar. *ININNAWA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 6-10.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). (2023). Rencana Strategis

- Infrastruktur Jalan Wilayah 3T. Jakarta: Kementerian PUPR.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). Panduan Implementasi Standar Nasional Pendidikan di Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Nugroho, A., & Hartini, S. (2022). Analisis Ketimpangan Infrastruktur Pendidikan di Wilayah Perdesaan. *Jurnal Pendidikan dan Pemerataan*, 10(2), 45–59.
- Rahmawati, D., & Supriyanto, H. (2023). Pengaruh Aksesibilitas Terhadap Partisipasi Sekolah di Wilayah Terpencil. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 5(1), 12–25.
- Sekretariat Negara RI. (2023). Pedoman Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pembangunan SDM. Jakarta: Setneg RI.
- TIMES Indonesia. (2025). Pendidikan Daerah 3T: Peran Pemerintah Masih Lemah. [Online].
- Darajah, R., & Wijayanti, U. T. (2023). Partisipasi orang tua milenial dalam aspek perkembangan sosial anak usia dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(1), 1162-1172.